

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini kemajuan dan perkembangan manajemen keuangan di Indonesia berkembang pesat dengan periode baru dalam melaksanakan keuangan daerah. Nasib suatu daerah berubah menjadi daerah yang maju dan berkembang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang sangat baik akan menjaga aset daerah terjaga juga keutuhannya (Livia Margarita, 2019).

Pada saat ini Sistem pemerintahan daerah berkaitan erat dengan otonomi daerah yang sampai saat ini telah berlangsung di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki dari daerah masing – masing. Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah daerah sendiri dituntut untuk meningkatkan kemandirian yang lebih dalam mengelola keuangan yang lebih besar. Dengan adanya tingkat kemandirian dalam mengelola keuangan yang lebih besar dari sebelumnya bahwa daerah tidak akan lagi bergantung pada pemerintahan pusat dan umum melalui dana cadangan (Putri Yani, 2020). Dengan adanya Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 kemudian berubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai dana cadangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Kewenangan yang lebih luas menunjukkan tanggungjawab yang lebih besar bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di pemerintahan desa tengerajo

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tenggerejo Terdapat 5 sektor prioritas strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi Tingkat kemiskinan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan infrastruktur pembangunan.
3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan.
4. Mengembangkan prasarana
5. Mengambil tindakan tepat yang dapat meningkatkan mutu sumber daya masyarakat.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi social budaya dan perekonomian masyarakat Tenggerejo, terutama terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan sebagai pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pada pemerintah daerah pengelolaan keuangan dituangkan dalam sistem yang terintegrasi yang disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (UU No. 32 Tahun 2004) pengelolaan keuangan dalam APBD ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan yang ada didaerahnya (Ning tias : 2015). Untuk mengetahui baik buruknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan kinerja keuangan. Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi yang dicapai pada periode tertentu dan menggunakan alat tertentu, sehingga semakin tinggi kinerja suatu organisasi maka semakin tinggi pula pencapaian tujuan pada organisasi (Ning tias : 2015). Cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah telah banyak dirumuskan oleh beberapa pakar, namun yang terpenting inti dari pengukuran kinerja keuangan

pemerintah ditekankan bagaimana pemerintah dapat menyerap anggarannya (N ning tias : 2015).

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh desa tenggerjo. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan tertuang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelola keuangan daerah dalam tahun tertentu yang berisi pendapatan dan pembiayaan dana pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib desa tenggerjo. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah akan mengurangi tingkat kemiskinan

Hasil dari kinerja keuangan pemerintah dapat dicerminkan dari bagaimana perubahan - perubahan program-program penting yang telah dijalankan seperti perubahan pada jumlah kemiskinan. Kemiskinan dapat dikatakan program penting dari pemerintah karena masyarakat yang miskin akan semakin sulit dalam menjangkau akses terhadap banyak sektor seperti pendidikan, kesehatan, dsb, dengan kondisi demikian pemerintah daerah juga di tuntut untuk memberikan kebijakan dalam menanggulangnya (N ning tias : 2015).

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin menurut data yang di peroleh peneliti dari kantor balai desa tenggerjo tahun 2017 – 2020 Jumlah penduduk miskin sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data tingkat kemiskinan desa tenggerejo tahun 2017-2020.

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase
2011	2591	112	4.32%
2012	2563	100	3.90%
2013	2834	104	3.67%
2014	3054	110	3.60%
2015	3109	202	6.50%
2016	3291	217	6.59%
2017	3325	240	7.22%
2018	3338	135	4.04%
2019	3350	199	5.94%
2020	3350	240	7.16%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tabel di atas menunjukkan tingkat kemiskinan di desa tenggerejo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data kemiskinan desa tenggerejo data pengukuran dilihat dari kriteria sebagai berikut : luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m2 per orang, lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban, hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, buruh bangunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan, pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD, dan tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, ataupun barang modal lainnya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum BPS berdasarkan ukuran standar minimum relatif pada

besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. sedangkan kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan tiap tahunnya (Almira et al). Beberapa program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan seperti Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), BPJS Kesehatan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun upaya pengentasan kemiskinan tersebut masih belum bisa dikatakan berhasil, di desa tenggerejo sendiri sudah melakukan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Jika suatu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik maka di dalamnya ada strategi, dan kebijakan ekonomi yang mendorong pembangunan yang harus fokus dalam sektor-sektor strategi, dan potensial di dalam wilayah baik dalam sektor secara riil, finansial dan infrastruktur agar bisa meningkatkan ekonomi. Tidak hanya itu saja monitoring dan evaluasi juga penting dalam hasil akhir pembangunan, maka dari itu peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dana sangat penting dalam keberhasilan peningkatan ekonomi daerah (Livia Margarita, 2019).

Belanja modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri (DJPB Kementerian Keuangan RI, 2011). Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berkontribusi pada perekonomian regional apabila benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya. Infrastruktur merupakan investasi penunjang yang menjadi salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi yang sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi lainnya (Tambunan, 2006).

Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan

pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai pemicu terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Keberadaan infrastruktur sangat penting, maka pembangunan infrastruktur layak mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional.

Desa merupakan pemerintahannya secara umum kekuasaannya berada di bawah pemerintah daerah, Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa di indonesia setelah di sahkanya UU No.6 Tahun 2014 akan mengalami pendekatan baru dalam melaksanakan tata kelola pemerintah desa dan pembangunan. Pengelolaan keuangan desa ialah kegiatan yang salah satu dilakukan oleh perangkat desa meliputi perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, pelaporan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa yang berfokus pada pembangunan desa yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan dari masyarakat desa.

Pembangunan adalah suatu usaha manusia dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang bisa di pergunakan dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan yang baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang, hal ini sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (Zikri Aulia, 2017) Pengelolaan anggaran dana desa dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dalam Pasal 1 Ayat 6 pengelolaan keuangan desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dalam Ayat 8 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disebut APBDesa yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Desa atau sebutan sebutan lain yang sangat beragam diindonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas batas wilayah,

Tata Kelola Pemerintahan desa di bilang baik dalam kesejahteraan masyarakatnya bisa dilihat atau di ukur melalui pertanggung jawaban dan dalam penyusunan APBDes. Desa memiliki pertanggung jawaban yang besar dalam menyusun laporan APBDes dan mempertanggung jawabkan semua pelaksanaan kegiatan yang telah di arahkan oleh pemerintahan pusat (Husnaeni Husain, 2020). Menurut M. Anwar (2019:5) bukunya berjudul Dasar – Daasar Manajemen Keuangan, Manajemen keuangan merupakan sesuatu yang disiplin dalam ilmu yang di pelajari tentang pengelolaan keuangan baik dari pengalokasian dana, pencairan sumber dana, dan pembagian keuntungan perusahaan, dengan tujuan agar perusahaanya dapat mengelola dana yang di miliki dari aspek keuangan sampai mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk di desa tenggerejo di bilang sudah melakukan manajemen nya dengan baik misalnya dalam memaksimalkan pengelolaan , pengalokasian keuangan dana dari pusat , tutur dari bendahara desa tenggerejo kabupaten lamongan.

Saat ini masyarakat dalam era keterbukaan, teknologi komunikasi dan informasi sudah berkembang dan maju, jadi masyarakat lebih mudah dalam menjangkau mendapatkan informasi dengan teknologi sekarang ini, sehingga masyarakat lebih sulit untuk di bohongi. Maka dari itu pemerintah desa lebih di tuntut untuk melakukan transparansi kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang terkait dalam pengelolaan sumber daya publik ke pihak yang membutuhkan informasi (Zikri Aulia, 2017)

Merujuk dari beberapa Penelitian terdahulu F Aulia Hafan (2019) berjudul “analysis of the performance of regional financial management and the effect on poverty levels in magelang regency” dengan hasil akhir Tingkat kemandirian masih dalam kriteria “rendah” dengan pola hubungan yang “instruktif”, artinya pemerintah daerah masih membutuhkan peran pemerintah pusat. tingkat kemahiran dalam kriteria “kurang”. Aktivitas keuangan atau keselarasan antara belanja langsung dan tidak langsung belum serasi. Efektivitas keuangan termasuk dalam kriteria efektif. Efisiensi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang termasuk dalam kriteria “tidak efisien”. Ditambah dengan pertumbuhan finansial yang masih dalam kriteria “rendah”. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan di Magelang dengan persentase penggunaan rasio keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Magelang. Penelitian terdahulu H.Mizkan et al (2015) berjudul “ analisis kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di kota pekanbaru” dengan hasil akhir Tingkat kemandirian masih dalam kriteria “kurang” dengan pola hubungan dengan Pemerintah Pusat yang bersifat “instruktif”.Tingkat kemampuan masih dalam kriteria “kurang”. Aktivitas keuangan untuk pembangunan termasuk dalam kriteria “baik”. Efektifitas keuangan termasuk dalam kriteria efektif. Efisiensi keuangan termasuk dalam kriteria “efisien”. Pertumbuhan keuangan termasuk dalam kriteria “baik”. Tingkat kemiskinan tidak sepenuhnya mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Namun demikian penurunan tingkat

kemiskinan Kota Pekanbaru terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Secara parsial tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Secara simultan, tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. penelitian terdahulu Yuyu Sri Eva (2019) berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan ,Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Berdasarkan Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan, pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di lihat dari rasio efektifitas cukup efektif, kinerja keuangan mengalokasikan dana desa (ADD) dilihat dari rasio pertumbuhan menghasilkan secara positif. Penelitian terdahulu Sobarudin (2019) berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa” dengan hasil 1). selama kurun waktu 4 tahun 2015 - 2018 rata -rata untuk rasio aktifitas belanja pembangunan lebih besar di dibandingkan dengan rata- rata rasio belanja rutusnya lebih besar di dibandingkan dengan rasio aktifitas belanja rutin , 2). Hasil dari perhitungan yang ada di rasio efektifitas PAD efektifitas, kinerja keuangan desa margosari belum efektif , 3). Rasio efisiensinya sudah termasuk sangat efisiensi, 4). Tingkat kemandirian pemerintahan kota pekalongan termasuk sangat rendah, 5) Rasio keserasiannya setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menjadikan pertumbuhan laporan APBDes mergosari menunjukkan pertumbuhan. Penelitian Terdahulu Husnaeni Husain (2020) berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang”. bahwa hasil penelitiannya menunjukkan sudah baik, bisa dilihat dari rasio efektifnya dikatakan sudah baik dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), rasio efisiensi di katakana bahwa kurang efisiensi karena pendapatan asli desa yang di terima lebih besar dari biaya yang telah di keluarkan, rasio pertumbuhan di katakana sudah tumbuh secara positif. Penelitian Terdahulu Livia Margarita (2019) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan, Untuk Mengukur Kinerja

Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Tahun anggaran 2014 – 2018” hasil dari penelitian menghasilkan bahwa rasio kemandirian masih di bilang rendah, rasio efektifitas di bilang sudah baik dan cukup efektif, rasio efesiensi sudah sangat baik karena sudah termasuk dalam kriteria, rasio keserasian kurang maksimal dalam mensesasikan dari tahun ke tahun, rasio pertumbuhan masih rendah dalam mengolah dananya. Penelitian Terdahulu (Zikri Aulia, 2017) berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur periode 2011-2015” hasil dari penelitian ini di lihat dari hasil akhir perhitungan rasio derajat desentralisasi fiscal dalam menyelenggarakan desentralisasi nya masih kurang, rasio kemandirian dengan hasil yang memiliki hubungan instruktif dalam arti bahwa kabupaten aceh masih ketergantungan pihak luar masih tinggi, rasio efektifitas PAD dengan hasil masih naik turun masudnya dalam tahun 2011 sampai Dengan 2013 tidak efektif tetapi pada tahun 2014 dan 2015 telah mencapai target, Rasio efesiensi pada tahun 2011 sampai dengan 2014 masih kurang efesiensi sedangkan pada tahun 2015 cukup efesiensi, rasio pertumbuhan belanja masih mengalami penurunan, rasio keserasian dalam menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung masih kecil.

Dengan demikian pemerintahan desa harus bisa memanfaatkan dana desa nya dengan baik agar bisa terlihat nyata bagi masyarakat desa sekitar. Tentang pemahaman pengelolaan alokasi dana desa, dan perangkat desa bisa menjadi aspek penting mendasar yang bisa di miliki kepala desa dan perangkat desa. Dasar - dasar dari pengelolaan dana desa yang pertama di mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan pelaporan pertanggung jawaban keuangan desanya serta tanggung jawaban para pengelolaan. Dengan pengelolaan keuangan dana desa tenggerejo yang transparan, efektif , jujur dan efesiensi maka peneliti perlu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintahan desa tenggerejo, sehingga bisa menjadikan bentuk bukti informasi dalam mengelola keuangan dana desa apakah desa berhasil dan mampu mengelola keuangan

dana desa secara baik, dan menjadikan dampak positif ke masyarakat desa (Husnaeni Husain, 2020).

Dari populasi yang ada di Desa Tenggerejo berdasarkan data sejumlah sekitar 823 kartu keluarga (KK) , dari data kartu keluarga tersebut masyarakat di desa tenggerejo sebagian mempunyai usaha bisnis perancangan dengan jumlah sekitar 20 seluruh desa tenggerejo, di desa tenggerejo sendiri juga mempunyai potensi mayoritas dari masyarakat nya seperti potensi pertanian , UMKM jamur tiram dengan jumlah data keseluruhan desa ada 10 orang , budidaya ternak ikan lele dengan jumlah keseluruhan hanya 3 orang dan untuk perkumpulan seperti ibu – ibu PKK beraktivitas membuat snack kering. Tetapi untuk masyarakat desa tenggerejo sendiri mayoritas berwirausaha bekerja pada bidang pertanian. Dari hal tersebut desa tenggerejo mempunyai kesempatan yang terbuka lebar untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian adanya pengalokasian dana desa jika ingin mengembangkan potensi desa di bidang pertanian. Dengan ini perangkat desa di tuntut mampu mengelola kegiatan yang sudah di anggarkan dalam laporan APBDes yang sudah secara transparan, professional dan akuntabel (Heppy Primadani, 2017).

Di desa tenggerejo pada tahun pengelolaan keuangan tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah mulai banyak perbaikan dari struktur kemajuan dari desa tenggerejo di antaranya hasil yang sudah terealisasikan seperti infrastruktur perbaikan jalan, pembangunan balai desa, perbaikan irigasi gorong-gorong di desa tenggerejo. Menurut informasi dari beberapa perangkat desa dan beberapa masyarakat bahwa di desa tenggerejo sudah mulai ada perbaikan dan kemajuan di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan dana desa juga sudah mulai ada kemajuan di lihat dari cara pengerjaan laporan keuangan desa, dari tahun 2017 pengerjaan laporan keuangannya masih manual kemudian di tahun 2018 sudah mulai pengerjaannya dengan aplikasi online tetapi belum maksimal, pada tahun 2019 sampai dengan 2020 laporan keuangan sudah online tutur dari bendahara desa menurut bendahara desa sendiri lebih

mudah dalam mengerjakan laporan keuangan menggunakan online Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dari pada manual.

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, pemerintah desa tenggerejo juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan kemiskinan khususnya di desa tenggerejo.

Dengan ini penelitian di desa tenggerejo kabupaten lamongan sebagai objek yang akan di teliti, dengan salah satu cara untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan desa dengan cara melakukan analisis perhitungan rasio keuangan dengan menggunakan data APBDes. Beberapa rasio keuangan yang di lakukan peneliti di penelitian ini menggunakan rasio efektifitas , rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio kemampuan, rasio aktivitas, rasio efesien. Dengan melihat fenomena di atas rasio tersebut bisa mengukur rasio efektifitas seberapa efektifkah desa tenggerejo dalam menjalankan pendapatan asli desa dalam mengelola kinerja keuangan desa, selanjutnya rasio kemandirian pemerintah desa seberapa mampukah dalam mempertahankan keberhasilan pertumbuhan yang sudah di capai dari beberapa periode sebelumnya, rasio pertumbuhan pemerintah desa sudah mampukah dalam membiayai kegiatan yang di programkan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan, rasio kemampuan Rasio kemampuan keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah yang mampu diperoleh dibandingkan dengan besarnya seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, rasio aktivitas Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, rasio rasio efisiensi Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kunci utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah melainkan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah dan mengelola realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah serta mengelola Aktivitas Keuangan Daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berfokus pada pembangunan yang berpusat pada manusia. Di era otonomi terlebih atas perhatian khusus yang diberikan ke pemerintah desa melalui otonomi khusus, memberikan peluang yang besar kepada pemerintah desa dalam hal pembiayaan pembangunan dan meningkatkan dalam kemiskinan masyarakat. Sehingga dengan perhatian khusus ini diharapkan mampu mengatasi masalah ketertinggalan proses atau usaha ini yang dilakukan untuk melakukan suatu perubahan kearah yang lebih baik dimasa depan. Perubahan yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kesenjangan dengan wilayah lain

Pada dasarnya Penelitian ini berusaha ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan APBD, keuangan daerah Desa tenggerejo dapat pengaruh di signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian **“Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Tenggerejo Kabupaten Lamongan”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio efektivitas berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan?
- 2) Apakah kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan?
- 3) Apakah kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan?
- 4) Apakah kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio kemampuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan?
- 5) Apakah kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio aktivitas berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan?
- 6) Apakah kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio efisien berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio efektifitas berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan.
2. Untuk menganalisis kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan.
3. Untuk menganalisis kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan.

4. Untuk menganalisis kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio kemampuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan.
5. Untuk menganalisis kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio aktifitas berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan.
6. Untuk menganalisis kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan rasio efisien berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa tenggerejo kabupaten lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio Efektivitas, kemandirian dan rasio pertumbuhan, rasio kemampuan, rasio aktivitas, rasio efisiensi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada desa tenggerejo kabupaten lamongan, dengan kehadiran penelitian yang telah di susun bisa di jadikan salah satu referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Desa Tenggerejo Kabupaten Lamongan akan pentingnya peningkatan kinerja keuangan daerah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

Bagi pemerintah Desa Tenggerejo Kabupaten Lamongan, penelitian ini dapat menjadi acuan referensi dan mengevaluasi pegawai maupun pihak yang ada dalam pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa di masa yang akan datang untuk kinerja perangkat desa selanjutnya.